

IMPLIKASI PENGUATAN KERJA SAMA TRILATERAL TERHADAP PERDAMAIAN SEMENANJUNG KOREA

Rizki Roza

Abstrak

Amerika Serikat (AS), Jepang dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk memperkuat kerja sama militer trilateral mereka untuk menghadapi ancaman program nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Korut). Langkah ketiga negara ini memicu kecaman Korut yang menyatakan akan meningkatkan kekuatan pertahanan untuk meresponsnya. Tulisan ini menggambarkan dinamika kerja sama trilateral dan implikasinya terhadap masa depan perdamaian Semenanjung Korea. Kerja sama trilateral terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi terutama oleh ancaman Korut serta dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, kepentingan AS di kawasan, dan gaya kepemimpinan masing-masing negara. Faktor ini telah membawa kerja sama trilateral pada kondisi saat ini, yaitu penggunaan pendekatan yang lebih keras terhadap Korut. Pendekatan yang lebih keras dikhawatirkan dapat memicu perlombaan senjata, respons yang berlebihan, dan salah perhitungan, yang akhirnya lebih berpotensi menyebabkan perang. Dihadapkan pada situasi ini, Indonesia, baik pemerintah maupun DPR RI perlu berupaya mencari peluang berkontribusi bagi upaya denuklirisasi dan reunifikasi di Semenanjung Korea.

Pendahuluan

Pada 3 Juli 2022 Korea Utara (Korut) menyampaikan kecamannya terhadap kesepakatan Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) untuk memperkuat kerja sama militer trilateral yang mereka arahkan untuk menghadapi ancaman Korut (theguardian.com, 3 Juli 2022). Korut memperingatkan bahwa langkah tiga negara ini merupakan desakan bagi Korut untuk memperkuat kemampuan

militernya. Korut selama ini menggunakan alasan 'permusuhan' sebagai faktor pendorong dalam menjalankan program nuklir dan rudal balistiknya.

Sikap Korut ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, melainkan siklus 'permusuhan' yang berulang dengan intensitas yang berbeda. Saat ini, dinamika di Semenanjung Korea dipengaruhi oleh hadirnya pemimpin baru Korsel. Korsel di bawah kepemimpinan Presiden



Yoon Suk-yeol (baru menjabat sejak 10 Mei), bersama Presiden AS Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, tampak jelas memilih pendekatan baru yang lebih keras terhadap Korut. Bagaimana implikasi pendekatan baru ini terhadap masa depan perdamaian di Semenanjung Korea menjadi perhatian masyarakat internasional. Indonesia, baik pemerintah maupun parlemen, juga harus turut mencermati perkembangan ini. Menyadari dampak buruk perang terhadap perdamaian dan kemakmuran dunia, Indonesia perlu terus mengkaji setiap peluang yang memungkinkan, termasuk melalui diplomasi parlemen, untuk berkontribusi bagi upaya denuklirisasi dan reunifikasi Semenanjung Korea. Tulisan singkat ini akan memberikan gambaran umum bagaimana implikasi penguatan kerja sama trilateral terhadap dinamika konflik di Semenanjung Korea, sehingga dapat menjadi informasi awal untuk melihat apa yang mungkin dapat dijalankan Indonesia untuk berkontribusi bagi upaya penyelesaian konflik.

Penguatan Kerja Sama Trilateral

Pada 29 Juni 2022 para pemimpin AS, Jepang, dan Korsel bertemu di sela-sela KTT NATO di Madrid. Ini merupakan pertama kalinya pemimpin Jepang dan Korsel menghadiri KTT NATO sebagai pengamat. Pemimpin ketiga negara menyatakan keprihatinan mendalam atas uji coba rudal yang dilakukan Korut dalam beberapa bulan terakhir. Ketiga negara sepakat bahwa kemajuan program nuklir dan rudal Korut merupakan ancaman serius bagi Semenanjung Korea, bahkan dunia. Pertemuan itu

menggarisbawahi perlunya memperkuat kerja sama dalam menghadapi ancaman nuklir Korut. Pemimpin ketiga negara menyamakan pandangan mereka mengenai konfrontasi dengan Korut dan mendiskusikan tindakan militer bersama untuk menanggulangnya, termasuk rencana untuk melakukan latihan militer gabungan tiga negara. AS juga kembali menegaskan bahwa AS menjaga komitmennya terhadap pertahanan Jepang dan Korsel. Perkembangan inilah yang kemudian memicu kecaman Korut.

Sejak era Perang Dingin berakhir, kerja sama trilateral ini telah menjadi salah satu pilar penting bagi keamanan dan stabilitas kawasan Asia Timur, terutama dalam membendung ancaman Korut. Bagi AS sendiri, kerja sama trilateral ini merupakan aspek kunci dari kerangka keamanan yang dibangun AS di kawasan itu, di mana Jepang bersama Korsel kini berkembang menjadi bagian penting dari kebijakan Indo-Pasifik AS. Banyak faktor yang telah membawa hubungan ketiga negara pada kondisi saat ini.

Kedekatan hubungan antara AS dan Korsel, terutama kesamaan pandangan terhadap ancaman Korut, tidak serta merta menempatkan kedua negara sebagai sekutu yang akan bersama-sama dalam menghadapi setiap persoalan di kawasan. Seoul memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap China untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Bahkan pada masa Presiden Moon Jae-in, Korsel mengandalkan keterlibatan China dalam upaya-upaya denuklirisasi Korut. Peningkatan kemitraan dengan AS mulai berkembang pesat setelah Yoon Suk-yeol menjabat Presiden Korsel. Sejak masa kampanyenya, Yoon telah menyampaikan kritik keras pada pemerintahan Moon karena terlalu dekat dengan China. Yoon mendorong untuk memperkuat hubungan dengan

AS sebagai mitra keamanan utamanya, bahkan menginginkan peningkatan kerja sama dengan Jepang.

Hubungan antara Jepang dan Korsel sebetulnya juga tidak terlalu harmonis, bahkan tidak jarang saling mencurigai. Pengalaman sejarah, terutama kenangan selama pendudukan Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945, seringkali menjadi penyebab memburuknya hubungan kedua negara, dan kemudian menjadi penghambat berkembangnya hubungan trilateral dengan AS. Hubungan terburuk terjadi di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in, dengan pertikaian atas wilayah dan sejarah, yang kemudian menyebabkan kedua negara membatalkan kesepakatan pertukaran informasi intelijen.

Dalam perkembangannya, di bawah kepemimpinan Yoon dan Kishida, kedua negara kemudian secara lebih terbuka menunjukkan posisinya yang pro Barat. Kehadiran kedua pemimpin dalam pertemuan NATO mempertegas posisi tersebut. Ini merupakan pertemuan pertama antara pemimpin kedua negara sejak Desember 2019, ketika hubungan kedua negara memburuk akibat perselisihan terkait pendudukan Jepang di Korea. Presiden Yoon mengatakan arti penting kerja sama trilateral ini terus meningkat seiring berkembangnya program nuklir Korut. Sedangkan PM Kishida mengatakan latihan anti rudal bersama sangat penting untuk menghadapi ancaman Korut. Pemimpin kedua negara juga menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan semua persoalan dan memulihkan hubungan agar kedua negara dapat bergerak maju merespons tantangan masa depan.

Mebutuhkan kedua negara sebagai bagian penting kebijakannya di kawasan, maka AS berkepentingan untuk mendorong kedua negara

memperbaiki dan memulihkan hubungan. AS berusaha berperan sebagai mediator antara kedua negara, seperti yang terlihat ketika AS berperan dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan Jepang-Korsel pada 2015. Kemampuan AS untuk memberikan jaminan keamanan bagi Korsel dan memberi respons cepat terhadap setiap aksi militer Korut, sangat ditentukan oleh keberadaan kekuatan pangkalan militer AS di Jepang. Kondisi ini kembali menegaskan bahwa militer Jepang dan Korsel harus memiliki hubungan yang baik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dinamika politik dan keamanan kawasan dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi kerja sama trilateral ini dan meningkatkan nilai strategis Jepang dan Korsel bagi kepentingan-kepentingan AS. Persepsi ancaman keamanan bersama yang terus meningkat telah menjadi pendorong Jepang dan Korsel untuk memperbaiki dan mempererat hubungan. Pada akhirnya kerja sama trilateral ini tidak semata-mata untuk merespons ancaman dari Korut. Kerja sama trilateral ini telah berkembang, dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Timur dan menghadapi ancaman nuklir Korut. Hal ini saat ini dipandang sebagian pihak sebagai elemen penting dalam menjaga secara lebih luas kawasan Indo-Pasifik.

Implikasi terhadap Semenanjung Korea

Pemerintahan Presiden Korsel sebelumnya, di bawah kepemimpinan Moon Jae-in, dikenal dengan pendekatannya yang lunak dalam mengelola hubungan dengan Korut dan berhati-hati dalam menjaga

ketergantungannya terhadap AS sebagai sekutu utama dan penjamin keamanannya. Pendekatan Pemerintahan Moon berhasil menciptakan catatan penting dalam sejarah panjang upaya perdamaian Semenanjung Korea, yaitu mempertemukan pemimpin AS dan Korut dalam pertemuan tingkat tinggi pada Juni 2018 di Singapura. Sebuah pertemuan yang menghasilkan periode yang cukup stabil di kawasan, di mana Korut berkomitmen untuk menghentikan uji coba rudal jarak jauh dan nuklir, sementara latihan militer bersama AS-Korsel dapat kembali dilaksanakan. Situasi stabil ini berakhir pada awal Januari 2020 ketika Presiden Korut menyatakan mencabut moratorium uji coba rudal dan nuklir. Keputusan Kim Jong Un itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap terhentinya perundingan Korut-AS. Kim tampaknya merasa tindakannya selama perundingan tidak mendapat balasan yang setimpal dari pihak AS.

Memasuki masa kepemimpinannya pada Mei 2022, masyarakat internasional mencermati arah politik dan kebijakan luar negeri Presiden Yoon. Sebagaimana diuraikan di atas, pemerintahan Yoon dan berbagai faktor lainnya telah melahirkan pendekatan baru terhadap persoalan Semenanjung Korea. Pendekatan baru yang mengedepankan penguatan kapabilitas militer dan kerja sama pertahanan di antara ketiga negara, dan keputusan Korut untuk melanjutkan program persenjataan jarak jauhnya dikhawatirkan akan membawa kawasan pada perlombaan senjata dan militerisasi yang lebih besar. Sampai saat ini, dinamika kawasan Semenanjung Korea mengarah pada kondisi yang tidak diinginkan tersebut.

Sepanjang tahun 2022, Korut tercatat telah melakukan uji coba peluncuran lebih dari 30 rudal balistik. Korut dianggap telah melakukan uji coba rudal dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak pihak meyakini pula bahwa Korut saat ini tengah mempersiapkan uji coba senjata nuklir. Pada Januari 2022 saja, Korut tercatat melakukan tujuh kali uji coba rudal balistik, suatu peningkatan pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan PBB, uji coba itu melibatkan satu rudal jarak pendek baru dan mengaplikasikan sejumlah teknologi maju yang menunjukkan bahwa kapabilitas Korut telah meningkat, antara lain kemampuan kecepatan penggelaran, keluasaan mobilitas, dan ketahanan kekuatan rudalnya.

Merespons tindakan Korut, ketiga negara mengadakan pertemuan tingkat Menlu di Hawaii pada 13 Februari 2022. Pertemuan itu membicarakan ancaman yang terus meningkat dari program nuklir Korut, terutama sejak Korut memulai kembali program nuklir dan rudal balistik pada 2021. Ketiga negara mengancam aktivitas uji coba rudal Korut dan menganggapnya sebagai aksi provokatif dan melanggar hukum, serta menegaskan kembali tekad dan pendekatan bersama mereka.

Uji coba rudal balistik terkini dilakukan Korut pada Juni lalu. Pada 5 Juni Korut menembakkan delapan rudal balistik jarak pendek ke arah laut di lepas pantai timurnya (cnn.com, 5 Juni 2022). Uji coba rudal tersebut dilakukan tepat sehari setelah angkatan laut AS dan Korsel menyelesaikan latihan gabungan tiga hari yang dilaksanakan di perairan Okinawa, Jepang. Uji coba ini menjadi peluncuran ke 17 yang dilakukan Korut pada tahun 2022. Peluncuran rudal lainnya terjadi pada 25 Mei 2022, segera setelah

Presiden Joe Biden menyelesaikan kunjungannya di Asia. Peluncuran rudal pada 5 Juni 2022 merupakan uji coba yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena melibatkan jumlah yang sangat banyak dan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Berbeda dengan uji coba pada Januari 2022 yang cenderung sebagai uji coba dan memamerkan kemajuan teknologi rudalnya, peluncuran kali ini dapat dilihat sebagai latihan dan unjuk kekuatan.

Bagi Korsel, peluncuran rudal Korut merupakan provokasi yang membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan, bahkan masyarakat internasional. Sementara ketiga negara melihat aktivitas uji coba rudal Korut sebagai ancaman bagi keamanan kawasan dan merupakan faktor pendorong penguatan kerja sama militer mereka. Sebaliknya Korut memandang setiap latihan militer yang dipimpin AS di kawasan itu, terutama yang dilakukan bersama Korsel, sebagai wujud latihan untuk melakukan invasi ke Korut.

Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, harus mulai berbuat lebih banyak untuk mencegah stabilitas keamanan dan perdamaian Semenanjung Korea berkembang menjadi lebih buruk dan membahayakan. Indonesia setidaknya dapat mendorong berbagai forum kerja sama di kawasan untuk lebih aktif membahas persoalan Semenanjung Korea, tidak terkecuali melalui forum kerja sama antarparlemen oleh DPR RI. Diharapkan suara lebih banyak negara dapat mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk kembali mengedepankan cara-cara dialog dan menghindari opsi-opsi yang mengarah pada perlombaan senjata.

Penutup

Penguatan kerja sama trilateral AS, Jepang, dan Korsel dapat dilihat sebagai suatu pendekatan baru dari pihak-pihak yang bertikai untuk tujuan yang masih sama, yaitu denuklirisasi dan reunifikasi Semenanjung Korea. Respons yang disampaikan pihak Korut juga masih untuk tujuan yang sama, yaitu menjaga kelangsungan hidup negaranya dan mengupayakan proses reunifikasi yang tidak merugikan negaranya. Berbagai upaya denuklirisasi dan reunifikasi dua Korea yang berulang kali mengalami pasang surut, hingga saat ini masih menyisakan kekhawatiran masyarakat internasional akan terjadinya perlombaan senjata di kawasan. Pendekatan baru ini harus diwaspadai, karena tekanan-tekanan militer mungkin saja memicu respons yang berlebihan dan salah perhitungan dari masing-masing pihak yang berujung pada risiko pecahnya perang.

Dinamika di Semenanjung Korea harus terus menjadi perhatian Indonesia, termasuk DPR RI. Indonesia perlu berupaya untuk mencari peluang berkontribusi bagi upaya perdamaian dan denuklirisasi Semenanjung Korea, terlebih Indonesia sudah memiliki modal dasar sebagai negara yang memiliki hubungan cukup netral dengan negara-negara yang bertikai. Indonesia setidaknya dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik bagi semua pihak dan mendorong semua pihak untuk lebih mengedepankan dialog dan cara-cara damai.

Referensi

"Beyond North Korea: The Japan-South Korea-US Trilateral in the Indo-Pacific", <https://thediplomat.com/2022/02/beyond-north-korea-the-japan-south-korea-us-trilateral-in-the-indo-pacific/>, diakses 5 Juli 2022.

Green, Christopher (2022). "North Korea Policy under the New South Korean President: More Continuity than Change", <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/korean-peninsula/north-korea-policy-under-new-south-korean-president-more-continuity-change>, diakses 5 Juli 2022

"North Korea launches 8 short-range ballistic missiles off east coast, South Korea says", <https://edition.cnn.com/2022/06/04/asia/north-korea-missile-launch-june-5-intl-hnk/index.html>, diakses 5 Juli 2022.

"North Korea says it may boost military to counter US, South Korea and Japan pact", <https://www.theguardian.com/world/2022/jul/03/north-korea-says-it-may-boost-military-to-counter-us-south-korea-and-japan-pact>, diakses 5 Juli 2022

"US, Japan, South Korea Leaders Voice Concerns About North Korean Aggression", <https://www.voanews.com/a/japan-south-korea-leaders-meet-on-sidelines-of-nato-summit-/6637746.html>, diakses 5 Juli 2022.



Rizki Roza
rizki.roza@dpr.go.id

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran" (2010); "Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer" (2013); dan "Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan" (2013).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.